



**KOMISI INFORMASI PUSAT
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA
REKOMENDASI RAPAT KOORDINASI NASIONAL
KOMISI INFORMASI SE-INDONESIA
TAHUN 2014**

KOMISI ADVOKASI, SOSIALISASI, DAN EDUKASI

Pada hari Sabtu tanggal 13 September 2014 bertempat di Hotel Grand Legi, Mataram, Nusa Tenggara Barat telah diadakan Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2014.

Berita Acara ini disusun dan dibuat oleh Peserta Rapat Komisi Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi (ASE) Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2014 yang nama-namanya tercantum dibawah ini:

Ketua : Arifuddin Jalil (Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau)

Sekretaris : Lilik Rukitasari (Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur)

SC :

Eko Satiya Hushada KI Prov. Kaltim

Henny S. Widyaningsih KI Pusat

Anggota :

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. A. Nashrudin | KI Prov. Banten |
| 2. Agus Marta | KI Prov.NTB |
| 3. Ahmad Yusran | KI Kab. Cirebon |
| 4. Azis Manansang | KI Prov.Gorontalo |
| 5. H. Muzammil | KI Kab. Bangkalan |
| 6. H.Mustahal Rasyid | KI Kab. Bangkalan |
| 7. Habel J. Runtuwene | KI Prov.Sulut |
| 8. Handoko Agung S | KI Prov.Jateng |

9. Hendri	KI Prov.Jambi
10. I Gede Agus Astapa	KI Prov.Bali
11. I. Farida	KI Prov.Jatim
12. Istiatun	KI Prov. DI Yogyakarta
13. Jehalim Banjun	KI Aceh
14. Joel B.A. Wanda	KI Prov.Papua
15. Khalida	KI Prov.Lampung
16. Liesminidiningsih	KI Prov.Kepri
17. M. Sjam Rhiza Siregar	KI Prov.Kalteng
18. M.Syahyan	KI Prov.Sumut
19. Mahi M Hikmat	KI Prov.Jawa Barat
20. Mattewakkang	KI Prov.Sulsel
21. Mirza Hidayat	KI Prov.Bengkulu
22. Moh Yusuf	KI Kab. Sumenep
23. Nadzmi Akbar	KI Prov.Kalsel
24. Rayudaswati Budi	KI Prov.Sulsel
25. Rikky Permana	KI Kep.Babel
26. Said Dailani Yahya	KI Prov.Riau
27. Siti Mariam	KI Prov.DKI Jakarta
28. Sulasiman	KI Prov.Sumsel
29. Syukriah	KI Prov.Sulteng
30. Toto Suharto	KI Kota Cirebon
31. Wahyu Kuncoro	KI Prov. Jatim

Berdasarkan hasil Rapat Komisi Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2014 telah memutuskan untuk merumuskan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Menyetujui semua hasil rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional Komisi Informasi se-Indonesia (RAKORNAS) 2013 dan Rapat Kerja Teknis (RAKERNIS) 2014 :

A. Non Regulasi

1. Penyelenggaraan *Right To Know Day* (RTKD) diselenggarakan di Jakarta oleh Komisi Informasi Pusat, jika diselenggarakan di Istana Presiden/Wakil maka penyelenggaraannya wajib dihadiri oleh Komisi Informasi Pusat, Provinsi, Kab/Kota. Rakornas 2014 mengusulkan tema besar untuk peringatan *Right to Know Day* 2014 mengandung unsur Budaya, Transparansi, Kemandirian dan Pemberantasan Korupsi. Dan untuk Sub Tema disesuaikan dengan kearifan lokal.

2. Menyetakati Pemingkatan Badan Publik dilakukan bidang ASE sesuai kesepakatan Rakornas Tahun 2013.
3. Menyetakati maskot Komisi Informasi untuk dilombakan.
4. Menyetakati slogan Komisi Informasi : BUKA! Informasi Publik.
5. Menyetakati adanya *Mailing list* khusus ASE.
6. Menyetakati penyelenggaraan *Capacity Building* untuk staff & Komisioner bidang ASE pada bulan Oktober.
7. Menyelenggarakan pertemuan rutin bidang ASE setiap 3 bulan sekali.

B. Regulasi

1. Menyetakati Pedoman Standardisasi Strategi Komunikasi Komisi Informasi.
2. Menyetakati Standardisasi Materi Sosialisasi Komisi Informasi.
3. Menyetakati Standardisasi Instrumen Pemingkatan Badan Publik dengan Metode :

Tahap I :

A. Self Assesment 25%

- Kuisisioner dibuat berdasar standar layanan informasi publik dalam UU KIP dan Perki SLIP
- BP mengisi sendiri atas kuisisioner yang sudah disiapkan.
- Diberi bobot 25 % mengandalkan kejujuran BP untuk menilai kondisi internalnya.
- Data *self assesssment* digunakan sebagai informasi awal kondisi BP, sekaligus sebagai alat kendali untuk melakukan penilaian tahap berikutnya.

B. Verifikasi Website 75%

- Harus ada *tool* berupa kuisisioner untuk menilai ketersediaan informasi publik di website, terutama yang masuk kategori informasi diumumkan secara berkala.
- Kuisisioner diisi oleh tenaga verifikator KI.
- Indikator penilain didasarkan pada SLIP. Karena itu, beberapa indikator dalam *self assessment* yang dipandang relevan bisa dimasukkan dalam kuisisioner verifikasi web.

- Diberi bobot 75% karena website sekarang ini merupakan sarana paling lazim digunakan untuk mempublikasikan informasi.
- Gabungan nilai Tahap I A dan B digunakan untuk menentukan BP mana yang akan divisitasi dalam setiap kelompok kategori BP

Tahap II :

Visitasi Badan Publik 40%

- Visitasi diambil 10-15 % ranking tertinggi dari BP yg masuk tahap I di setiap rumpun BP
- Harus ada *tool* berupa kuisioner yang digunakan sebagai panduan penilaian.
- Kuisioner diisi oleh visitator KI.
- Kuisioner tidak hanya untuk menggali data kuantitatif, tapi juga data kualitatif yang bisa dinarasikan secara singkat oleh visitator.
- Visitasi ditekankan untuk melihat bukti-bukti materiil yang sudah diinformasikan dalam *self assessment*, terutama informasi yang masuk kategori tersedia setiap saat.
- Visitasi juga untuk melihat suasana tempat layanan informasi, permohonan, pelayanan, serta inovasi-inovasi yang dilakukan BP.

2. Merekomendasikan hasil rapat komisi bidang advokasi, sosialisasi dan edukasi sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan membentuk Forum Komunikasi PPID Komisi Informasi se-Indonesia
- 2) Mengusulkan penguatan Strategi Komunikasi membangun Citra Lembaga
- 3) Mengusulkan membangun portal khusus putusan-putusan Komisi Informasi se-Indonesia
- 4) Mengusulkan untuk menciptakan Mars Komisi Informasi
- 5) Mengusulkan sosialisasi Instrumen dan metodologi Pemeringkatan Badan Publik dari Komisi Informasi Pusat kepada KI Provinsi dan KI Provinsi kepada KI Kab/Kota
- 6) Mengusulkan sosialisasi instrumen dan metodologi Pemeringkatan Badan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, Provinsi, Kab/Kota kepada Badan Publik

- 7) Mengusulkan kepada Pemerintah agar menetapkan 28 September sebagai Hari Keterbukaan Informasi Nasional secara resmi.
- 8) Mengusulkan MoU dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk membangun Budaya Keterbukaan Informasi Publik yang dimulai di sekolah tingkat dasar.
- 9) Mengusulkan untuk membuat pedoman Teknis Bidang ASE.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mataram, 13 September 2014



Lilik Rukitasari
Sekretariat Rapat Komisi ASE



Arifuddin Jalil
Ketua Rapat Komisi ASE

KOMISI INFORMASI PUSAT